

**ANALISIS PENGARUH KETIMPANGAN TINGKAT
PENDIDIKAN TERHADAP KETIMPANGAN
PENDAPATAN DI KABUPATEN AGAM**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Sebagai
Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*



Oleh

**BUSTANUL AFDAL
BP/NIM. 2005/67872**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH KETIMPANGAN TINGKAT PENDIDIKAN
TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN
DI KABUPATEN AGAM**

Nama : Bustanul Afdal
BP/NIM : 2005/67872
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2011

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S
NIP. 19610502 198601 2001

Drs. Zul Azhar, M.Si
NIP. 19590805 198503 1006

Mengetahui :
Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan

Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S
NIP. 19610502 198601 2001

PENGESAHAN SKRIPSI

**Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

**Judul : Analisis Pengaruh Ketimpangan Tingkat Pendidikan
Terhadap Ketimpangan Pendapatan
di Kabupaten Agam**

Nama : Bustanul Afdal

BP/NIM : 2005/67872

Keahlian : Perencanaan Pembangunan

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2011

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S	_____
2. Sekretaris	: Drs. Zul Azhar, M.Si	_____
3. Anggota	: Novya Zulva Riani, SE, M.Si	_____
4. Anggota	: Dr. H. Hasdi Aimon, M.Si	_____

ABSTRAK

BUSTANUL AFDAL (2005/67872): Analisis Pengaruh Ketimpangan Tingkat Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten Agam. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan. Universitas Negeri Padang. Di bawah Bimbingan Ibuk Dr. Sri Ulfa Sentosa, MS dan Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Ketimpangan Tingkat Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Agam. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Agam.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan asosiatif. Data yang digunakan adalah data *time series* dari tahun 1994-2008, yang di kumpulkan melalui instansi yang terkait yaitu Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis induktif. Analisis induktif dalam penelitian ini mencakup (1) regresi sederhana. (2) Uji autokorelasi. (3) uji normalitas. (4) koefisien determinasi. (5) uji t.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapatnya pengaruh yang signifikan antara ketimpangan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Agam. Pada tabel dapat dilihat t_{hitung} yang diperoleh lebih besar di bandingkan t_{tabel} yakni $1,907 > 1,771$. Pada 0,05 akibatnya H_0 di tolak dan H_a diterima, sehingga hipotesis alternatif yang di ajukan dalam penelitian ini diterima, bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara ketimpangan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Agam. Dengan terbuktinya adanya pengaruh yang signifikan antara ketimpangan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Agam, disarankan kepada seluruh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Agam agar adanya pemerataan pendidikan dan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga dengan pendidikan yang tinggi maka produktifitas kerja penduduk juga akan meningkat sehingga pendapatan yang diterima juga akan meningkat. Dan dengan sendirinya ketimpangan pendidikan akan menurun sehingga ketimpangan pendapatan di Kabupaten Agam juga akan menurun.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan pada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Analisis Pengaruh Ketimpangan Tingkat Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten Agam**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu (S1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Rasa terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S selaku pembimbing I, dan Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penelitian ini dan telah banyak memberikan masukan kepada penulis sampai penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta berbagai pihak yang berperan dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi.

Oleh karena itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syamsul Amar B. M.S selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ibuk Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S, sebagai Ketua dan Bapak Drs. Akhirmen, M.Si, sebagai Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen penelaah dan penguji, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis.
4. Bapak-bapak Ibu-ibu dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi serta karyawan dan karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di almamater ini.
5. Teristimewa kepada kedua Orang tua beserta keluarga tercinta yang terus memberikan do'a dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Ekonomi Pembangunan angkatan 2005 tanpa terkecuali.
7. Dan semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana.

Dalam rangka penyempurnaan isi skripsi ini penulis mengharapkan sumbangan pikiran para pembaca berupa kritikan dan saran, semoga skripsi ini dapat dijadikan bahan bacaan bagi rekan-rekan dimasa yang akan datang.

Padang, Februari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	9
1. Distribusi Pendapatan	9
2. Metode Menghitung Pendapatan	15
3. Pendidikan	20
4. Pendapatan	24
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Kerangka Konseptual	27
D. Hipotesis	28

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	29
B. Tempat dan Waktu Penelitian	29
C. Jenis dan Sumber Data	30
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Definisi Operasional Variabel	31
F. Teknik Analisis Data	31
1. Analisis Deskriptif	31
2. Analisis Ketimpangan Pendidikan dan Pendapatan	32
3. Analisis Induktif	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	37
1. Gambaran Umum Kabupaten Agam	37
2. Deskriptif Variabel Penelitian	41
3. Analisis Induktif	49
B. Pembahasan	53

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	56
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA	58
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	60
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perkembangan Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Agam Tahun 1999-2008.....	1
2. Jumlah dan Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan di Kabupaten Agam Tahun 2008	2
3. Persentase Penduduk Kabupaten Agam dan Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan Tahun 1998-2007	3
4. Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Dan Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki Di Kabupaten Agam Tahun 1999-2008	5
5. Nilai Durbin Watson	34
6. Perkembangan Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Agam Tahun 1994-2008	39
7. Perkembangan Tingkat Ketimpangan Pendidikan di Kabupaten Agam Tahun 1994-2008	43
8. Perkembangan Tingkat Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Agam Tahun 1994-2008	46
9. Nilai Koefisien Regresi Sederhana	49
10. Hasil Uji Durbin-Watson Ketimpangan Pendidikan Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan	50
11. Hasil Uji Normalitas dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov	51
12. Hasil Analisis R^2	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kurva Lorenz	12
2. Interpretasi Koefisien Gini.....	13
3. Kerangka Konseptual	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Tabulasi Data Ketimpangan Pendidikan	60
2. Tabulasi Data Distribusi Pendapatan	61
3. Tabulasi Data Ketimpangan Pendidikan Dengan Menggunakan Rumus Gini Rasio	62
4. Tabulasi Data Distribusi Pendapatan Dengan Menggunakan Rumus Gini Rasio	67
5. Tabel NPar Test	71
6. Hasil Uji Regresi	72
7. Charts	74
8. Hasil Uji Korelasi	77
9. Tabel t	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Agam merupakan salah satu kabupaten yang merupakan bagian dari Propinsi Sumatera Barat yang memiliki jumlah penduduk seperti yang terlihat pada Tabel 1 Tentang Perkembangan Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Agam Tahun 1994-2008.

Tabel 1 : Perkembangan Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Agam Tahun 1994-2008

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan (%)
1	1994	423.262	-
2	1995	428.567	1,25
3	1996	433.540	1,16
4	1997	433.693	0,04
5	1998	434.791	0,25
6	1999	436.496	0,39
7	2000	417.324	-4,39
8	2001	418.837	0,36
9	2002	422.231	0,81
10	2003	428.556	1,50
11	2004	431.603	0,71
12	2005	435.276	0,85
13	2006	439.611	1,00
14	2007	443.857	0,97
15	2008	445.387	0,34
Rata-rata		6.473.031	0,35

Sumber : Agam Dalam Angka Tahun 1994-2008

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Agam cenderung berfluktuasi sejak periode 1994 sampai tahun 2008. Berfluktuasinya laju pertumbuhan penduduk ini, kemungkinan akan berpengaruh terhadap tingkat pengeluaran perkapita di Kabupaten Agam.

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk yang terendah terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar -4,39 persen. Terjadinya

pertumbuhan penduduk yang rendah ini kemungkinan akan berpengaruh terhadap pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten Agam. Rendahnya laju pertumbuhan penduduk ini kemungkinan akan menyebabkan peningkatan pendapatan perkapita di Kabupaten Agam, sehingga kesejahteraan penduduk juga akan meningkat.

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar 1,50 persen. Tingginya laju pertumbuhan penduduk ini akan menyebabkan meningkatnya angkatan kerja, sedangkan kesempatan kerja terbatas sehingga akan terjadi pengangguran yang tinggi. Ini akan berpengaruh terhadap tingkat pengeluaran perkapita yaitu rendahnya daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa.

Selanjutnya pada Tabel 2 disajikan data tentang jumlah dan persentase penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan di Kabupaten Agam tahun 2008.

Tabel 2 : Jumlah Dan Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Di Kabupaten Agam Pada Tahun 2008

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani / Pekebun	93.521	48,07
2	Peternak	761	0,39
3	Nelayan / Perikanan	2.458	1,26
4	Industri	6.985	3,59
5	Konstruksi	2.740	1,41
6	Perdagangan	20.183	10,37
7	Transportasi	5.468	2,81
8	Jasa Pemerintahan umum & pertahanan	11.145	5,73
9	Jasa lainnya	23.939	12,31
10	Lainnya	27.344	14,06
Jumlah		194.544	100

Sumber : Agam Dalam Angka Tahun 2008

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa sebagian besar (50,28%) penduduk di Kabupaten Agam bekerja di sektor non pertanian dan sebagian kecil (49,72%) penduduk di Kabupaten Agam bekerja di sektor pertanian. Hal ini kemungkinan akan menyebabkan terjadinya perbedaan pendapatan diantara penduduk antara penduduk yang bekerja di sektor pertanian dengan penduduk yang bekerja di sektor non pertanian.

Pendapatan penduduk di Kabupaten Agam dapat dilihat dari jumlah pengeluaran perkapita perbulan. Pada Tabel 3 disajikan data mengenai Persentase Penduduk Kabupaten Agam dan Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan Tahun 1994-2008.

Tabel 3 : Persentase Penduduk Kabupaten Agam dan Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan Tahun 1994-2008

No.	Tahun	Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan (Rp)		
		Rendah (Kurang Dari 150,000)	Sedang (Antara 150,000-300,000)	Tinggi (Lebih Dari 300,000)
1	1994	98,24	1,76	0,00
2	1995	99,46	0,54	0,00
3	1996	99,48	0,52	0,00
4	1997	98,47	1,53	0,00
5	1998	98,10	1,86	0,04
6	1999	73,39	24,71	1,90
7	2000	68,84	29,41	1,75
8	2001	65,24	34,84	1,92
9	2002	44,27	43,23	12,50
10	2003	45,49	46,62	8,89
11	2004	41,65	46,07	12,28
12	2005	33,15	49,21	16,64
13	2006	18,96	52,49	28,55
14	2007	11,05	50,12	38,83
15	2008	1,99	26,38	71,63

Sumber: Susenas Tahun 1994-2008

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa pada periode 1994-2008 pengeluaran perkapita sebulan penduduk Kabupaten Agam yang berpendapatan kurang dari Rp 150.000,- atau golongan rendah sudah mulai menurun. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Agam. Pada tahun 1994 pengeluaran perkapita penduduk yang kurang dari Rp 150.000,- adalah sebesar 98,24 persen, kemudian menurun pada tahun 2008 sampai dengan 1,99 persen. Penurunan pengeluaran perkapita penduduk yang kurang dari Rp 150.000,- ini mungkin disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan yang diterima oleh penduduk, disamping itu kemungkinan disebabkan oleh membaiknya keadaan perekonomian masyarakat setelah terjadi krisis ekonomi tahun 1997-1998 lalu.

Pada Tabel 3 dapat diketahui pada periode 1994-2008 golongan pengeluaran perkapita sebulan penduduk antara Rp 150.000 – Rp 300.000 mengalami peningkatan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan yang diterima oleh penduduk, selain itu juga disebabkan oleh membaiknya perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya pada periode 1994-2008 golongan pengeluaran perkapita sebulan penduduk besar dari Rp 300.000,- juga mengalami peningkatan tiap tahunnya. Peningkatan jumlah pengeluaran penduduk yang berada pada kelompok ini juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada tingkat pendapatan penduduk yang berarti bahwa kesejahteraan penduduk mengalami peningkatan.

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa golongan pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Agam dalam sebulan relatif rendah. Hal ini mungkin

disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan serta pendapatan yang diterima oleh masyarakat dan tidak meratanya distribusi pendapatan sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan.

Jika ditinjau dari Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Dan Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki Serta Laju Pertumbuhannya Di Kabupaten Agam dapat dilihat dari Tabel 4 berikut :

Tabel 4 : Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Dan Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki Di Kabupaten Agam Tahun 1994-2008

Tahun	Tingkat Pendidikan					
	Diploma IV s/d S3	Diploma I/II/III	SMTA	SMTP	SD	Tidak/Belum Tamat SD
1994	0,63	0,47	11,24	14,53	29,55	43,58
1995	0,78	1,02	11,77	14,38	32,08	39,97
1996	1,70	1,30	11,63	14,41	29,47	41,49
1997	0,95	1,41	12,80	16,04	29,74	39,06
1998	1,54	1,03	11,45	15,90	29,75	40,33
1999	1,89	0,95	13,17	14,90	31,79	37,30
2000	2,38	1,50	15,69	17,35	25,73	37,35
2001	2,03	1,83	13,25	15,36	29,53	38,00
2002	1,93	2,09	16,81	20,93	28,78	29,46
2003	1,81	1,60	14,13	22,16	29,84	30,46
2004	1,29	2,31	15,97	20,01	27,43	32,99
2005	2,20	2,58	15,97	19,94	27,03	32,28
2006	2,24	3,37	18,43	18,53	26,59	30,84
2007	3,11	2,44	20,42	17,15	27,84	29,04
2008	2,79	3,84	19,92	17,03	25,22	31,20

Sumber : Susenas, Propinsi Sumatera Barat Tahun 1994-2008

Pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa persentase penduduk 10 tahun keatas dan ijazah tertinggi yang dimiliki tahun 1994-2008 untuk jenjang Diploma IV s/d S3, Diploma I/II/III, SMTA, SMTP, SD/MI dan Tidak/Belum Tamat SD mengalami fluktuasi. Mulai tahun 1994 persentase penduduk untuk jenjang pendidikan tingkat Diploma I/II/II yaitu sebesar 0,47 persen. Sedangkan untuk tingkat Diploma IV s/d S3 berjumlah 0,63 persen. Kemudian meningkat sampai

tahun 2008 sebesar 2,79 persen untuk Diploma IV s/d S3 dan 3,84 persen untuk Diploma I/II/III. Rendahnya persentase ini kemungkinan disebabkan oleh mahalnya biaya pendidikan untuk masuk ke perguruan tinggi, sehingga hanya sebagian kecil penduduk saja yang dapat mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Pada Tabel 4 diketahui bahwa persentase penduduk 10 tahun keatas dan ijazah tertinggi yang dimiliki untuk Tidak/Belum Tamat SD adalah 43,58 persen pada tahun 1994 kemudian menurun sampai tahun 2008 sampai dengan 31,20 persen, penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan masyarakat dan semakin murah biaya pendidikan terutama tingkat SD/MI, selain itu adanya program sekolah gratis yang dicanangkan oleh pemerintah.

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Agam relatif rendah. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Agam, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi pendapatan yang diterima masyarakat dan ketimpangan distribusi pendapatan akan menurun.

Tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap jumlah pendapatan yang diterima, dimana jika semakin tinggi tingkat pendidikan maka produktivitas kerja penduduk akan meningkat, sehingga pendapatan yang diterima juga akan meningkat. Selain itu, pendidikan dapat menambah keterampilan dan produktifitas seseorang sehingga akan mampu meningkatkan pendapatan seseorang.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat akan mengakibatkan rendahnya kualitas sumberdaya manusia seperti rendahnya produktivitas kerja yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan, serta tidak meratanya distribusi pendapatan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“ANALISIS PENGARUH KETIMPANGAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI KABUPATEN AGAM”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketimpangan pendidikan penduduk di Kabupaten Agam?
2. Bagaimana ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Agam?
3. Sejauhmana pengaruh ketimpangan pendidikan penduduk terhadap ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Agam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Ketimpangan tingkat pendidikan diantara penduduk di Kabupaten Agam.
2. Ketimpangan pendapatan diantara penduduk di Kabupaten Agam.
3. Pengaruh ketimpangan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Agam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pikiran bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti secara lebih mendalam dari masalah yang belum terungkap.
2. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang pengaruh tingkat pendidikan terhadap distribusi pendapatan di Kabupaten Agam.
3. Pengambil kebijakan yaitu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Agam, Pemerintah Kecamatan dan Nagari.
4. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi UNP.
5. Pengembangan ilmu pengetahuan yaitu Ilmu Ekonomi Pembangunan.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Distribusi Pendapatan

a. Pengertian dan Jenis-jenis Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara dikalangan penduduknya. Salah satu indikator utama untuk mengukur kemampuan ekonomi masyarakat adalah tingkat pendapatan masyarakat. Indikator yang dimaksud bersangkutan dengan pendapatan dan pengeluaran, dan yang lebih penting adalah mengetahui besarnya perbandingan penerimaan dan pengeluaran.

Kesenjangan distribusi pendapatan merupakan masalah pokok dalam pembangunan karena distribusi pendapatan ini mencerminkan merata atau tidaknya hasil pembangunan yang dilakukan.

Menurut Todaro (2000:180) para ekonom membedakan dua ukuran pokok distribusi pendapatan, yang keduanya digunakan untuk berbagai keperluan kajian kuantitatif. Kedua ukuran tersebut adalah ukuran distribusi, yakni besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang dan distribusi fungsional atau kepemilikan faktor-faktor produksi.

1) Distribusi Pendapatan Fungsional

Distribusi pendapatan Nasional fungsional adalah distribusi yang menerangkan bagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh

masing-masing faktor produksi (tanah, tenaga kerja, modal). Disamping memandang individu sebagai kesatuan yang terpisah, teori ukuran distribusi pendapatan fungsional juga menyelidiki persentase yang diterima oleh tenaga kerja secara keseluruhan dibanding dengan persentase yang diterima oleh tenaga kerja secara keseluruhan dibanding dengan persentase pendapatan Nasional yang terdiri dari sewa, bunga dan laba.

2) *Distribusi Pendapatan Perorangan*

Distribusi pendapatan perorangan adalah menunjukkan hubungan antara individu-individu atau rumah tangga dengan total pendapatan yang mereka terima. Dalam konsep ini tidak memperhitungkan dari mana pendapatannya diperoleh dan berapa besarnya masing-masing individu atau rumah tangga yang menerima serta asalnya apakah dari bekerja atau dari penerimaan lain seperti bunga, hibah, laba, warisan, dan lain-lain.

Menurut Sukirno (1988:64) distribusi pendapatan di beberapa negara terdapat dua analisis diantaranya *distribusi pendapatan relatif* yang merupakan perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan, dan *distribusi pendapatan mutlak* yaitu jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang dari itu.

b. Ukuran Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Menurut Todaro (2003:222) penerimaan pendapatan dapat digolongkan kedalam tiga golongan yaitu: 40% penduduk yang menerima paling rendah,

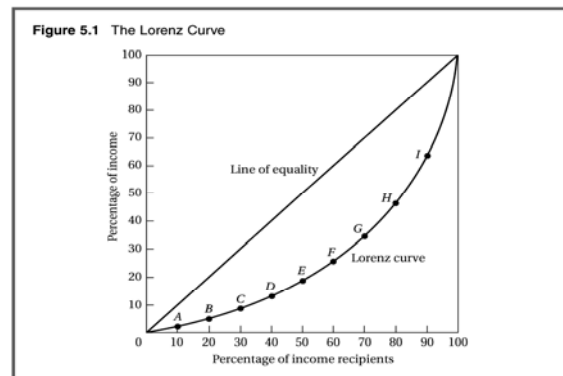
40% penduduk berpendapatan menengah dan 20% penduduk berpendapatan paling tinggi. Di Negara komunis 40% dari seluruh pendapatan masyarakat di Negara maju golongan penduduk ini menerima kurang lebih sebesar 16% sedangkan Negara-Negara berkembang mereka hanya menerima yang lebih 12,5% dari keseluruhan pendapatan masyarakat.

Makin tinggi pendapatan perkapita suatu masyarakat makin kecil proporsi penduduknya yang berpendapatan dibawah garis kemiskinan tergantung pula pada corak distribusi pendapatan makin tidak merata distribusi pendapatan makin besar persentase penduduk yang berpendapatannya dibawah garis kemiskinan. Menurut penelitian Michael P. Todaro ketimpangan distribusi pendapatan dapat diukur dengan sebagai berikut :

1) Kurva Lorenz

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan Nasional dikalangan lapisan-lapisan masyarakat, kurva Lorenz terletak didalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan Nasional. Sedangkan sisi datarnya mewakili kumulasi persentase penduduk. Kurvanya ditempatkan pada garis diagonal (semakin lurus) menyatakan distribusi pendapatan yang semakin merata. Sebaiknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari garis diagonal (semakin lengkung), mencerminkan keadaan yang semakin memburuk, distribusi pendapatan yang semakin timpang atau tidak merata.

Gambar 1: Kurva Lorenz



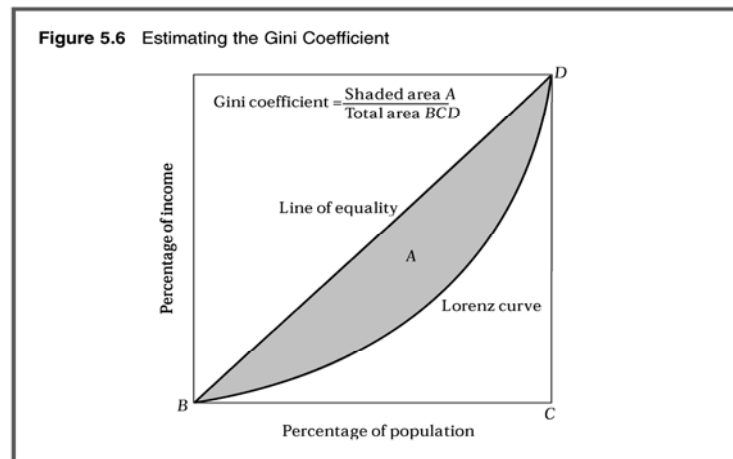
Sumber : Todaro, Michael. P. Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga 2002.

2) Koefisien Gini (*Coefission Gini*) atau Gini Rasio

Koefisien Gini merupakan ukuran ketimpangan pendapatan agregat (keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Koefisien yang derajat ketimpangannya tinggi berkisar antara 0,50-0,70, sedangkan untuk distribusi pendapatan yang relative merata angkanya berkisar 0,20-0,35.

Indeks atau Gini rasio adalah suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 hingga 1, menjelaskan pemerataan (ketimpangan) distribusi pendapatan Nasional. Semakin kecil (semakin mendekati 0) koefisiennya, maka semakin baik atau merata distribusi pendapatan. Dan sebaliknya semakin besar (semakin mendekati 1) koefisiennya, maka distribusi pendapatan yang semakin timpang.

Gambar 2 : Interpretasi Koefisien Gini



Sumber : Todaro, Michael. P. Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga 2002.

Gini rasio ini diperoleh dengan membagi daerah yang dibentuk oleh kurva Lorenz bersama garis diagonal dengan cara segitiga yang terdapat dalam bujur sangkar dimana kurva Lorenz itu berada. Seperti pada Gambar 2, Gini rasio merupakan rasio luas bidang X (luas bidang yang di arsir) terhadap luas segitiga BCD atau secara matematis :

$$\text{Gini Rasio} = \frac{\text{LuasBidangX}}{\text{SegiTitgaABC}} = \frac{X}{X + Y} \dots\dots\dots(1)$$

Dipilih Gini rasio sebagai alat pengujian karena Gini memiliki beberapa kelebihan (Todaro, 2000:226) yang dikutip dalam Melani sebagai berikut :

- a) Merupakan indikator yang paling terkenal dan umum digunakan.
- b) Merupakan variabel yang dinamis dalam mengukur ketidakmerataan pendapatan baik antar daerah maupun antar sektor dalam suatu negara.

- c) Memperhatikan kecenderungan yang sama menurut kurun waktu dan antar daerah yang dicapai dengan menggunakan ukuran yang berbeda.

Rumus Gini Rasio menurut BPS (2006:8) yaitu:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^K f_i(Y_i + y_{i-1}) \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

Y_i = Proporsi secara kumulatif dari jumlah pendapatan rumah tangga sampai kelas ke- i

f_i = Proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas i

k = Jumlah kelas

3) Kriteria Bank Dunia (*World Bank*)

Bank Dunia (*World Bank*) mengukur distribusi pendapatan dengan cara menyoroti secara khusus proporsi pendapatan yang diperoleh golongan penduduk dari kelompok pendapatan 40 persen terbawah.

Kriteria yang dipergunakan oleh Bank Dunia (*World Bank*) adalah sebagai berikut :

- a) Apabila kelompok 40% penduduk termiskin memperoleh pendapatan lebih kecil dari 12% dari keseluruhan pendapatan nasional, dapat dikatakan bahwa negara tersebut berada dalam tingkat ketimpangan yang tinggi dalam distribusi pendapatan.
- b) Apabila kelompok 40% penduduk termiskin memperoleh pendapatannya antara 12-17% dari keseluruhan pendapatan nasional,

maka dapat dikatakan bahwa di negara tersebut terjadi tingkat ketimpangan sedang (moderat) dalam distribusi pendapatannya.

- c) Apabila kelompok 40% penduduk termiskin memperoleh pendapatannya lebih dari 17% dari keseluruhan pendapatan nasional, maka dapat dikatakan bahwa di negara tersebut tingkat ketimpangan yang terjadi adalah rendah.

Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, ada 3 kriteria yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan yaitu : Kurva Lorenz, Koefisien Gini dan Kriteria Bank Dunia (*World Bank*).

Masalah ketimpangan pembagian pendapatan sebenarnya berkaitan erat dengan perbedaan tingkat pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Pemanfaatan faktor produksi tersebut akan mencerminkan besar kecilnya pendapatan yang diterima seseorang dalam masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya menimbulkan perbedaan yang mencolok antara golongan berpendapatan tinggi dan rendah. Golongan yang berpendapatan tinggi menguasai hampir hampir seluruh faktor produksi dan tenaga kerja faktor penentu pembagian pendapatan.

2. Metode Menghitung Pendapatan

Salah satu indikator utama untuk mengukur kemampuan ekonomi masyarakat adalah tingkat pendapatan masyarakat. Indikator yang dimaksud hanya bersangkutan dengan pendapatan dan pengeluaran, akan tetapi yang

lebih penting adalah mengetahui besarnya perbandingan antara penerimaan dan pengeluaran.

Jika dilihat dari segi pendapatan nasional, maka pendapatan nasional adalah nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun. Ada 3 metode dalam menghitung pendapatan yaitu :

a. Metode Pengeluaran

Menurut Sukirno (2000:31) pendapatan nasional yang dihitung dengan menghitung dan menaksir aliran belanja yang dilakukan rumah tangga, penanaman modal pemerintah dan luar negeri. Aliran belanja ini merupakan nilai pengeluaran yang dilakukan terhadap barang-barang akhir dan jasa akhir yang diproduksi oleh perusahaan.

Menurut Deliarnov (2005:24) menggolongkan pengeluaran sebagai berikut :

- 1) Pengeluaran konsumsi, yaitu total semua pengeluaran rata-rata untuk membeli barang dan jasa untuk keperluan rumah tangga;
- 2) Pengeluaran perusahaan atau investasi, yaitu pengeluaran untuk membeli barang modal atau investasi;
- 3) Pengeluaran konsumsi pemerintah, yaitu pengeluaran yang bersifat konsumsi yang dilakukan pemerintah atas barang dan jasa seperti perbaikan jalan;
- 4) Ekspor bersih, yaitu selisih ekspor dan impor.

Jadi, untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode pengeluaran, maka pendapatan nasional diperoleh dengan menjumlahkan nilai pengeluaran rumah tangga, pengeluaran investasi, pengeluaran

pemerintah dan ditambah dengan pengeluaran atas barang-barang impor atau selisih ekspor dan impor. Sehingga uraian diatas menyatakan bahwa dalam metode pengeluaran, pengeluaran terdiri dari pengeluaran konsumsi, non konsumsi dan tabungan.

b. Metode Pendapatan

Menurut Sukirno (2000:32), dalam metode pendapatan yang dihitung dan ditaksir adalah nilai pendapatan dari faktor-faktor produksi, yang berupa gaji dan upah, sewa dan bunga serta keuntungan perusahaan. Pendapatan dari faktor-faktor produksi yang penting adalah upah dan gaji. Jenis pendapatan ini merupakan imbalan kepada tenaga kerja dalam perekonomian baik itu tenaga kerja terdidik maupun tenaga kerja tak terdidik.

Deliarnov (2005:25) menggolongkan pendapatan atas 2 yaitu : pendapatan pribadi dan pendapatan disposibel. Pendapatan pribadi adalah pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota baik dari hasil kerja, beasiswa, pembayaran pensiun dan sebagainya.

c. Metode Produksi dan Nilai Tambah

Menurut Sukirno (2000:33), dalam menghitung pendapatan nasional dengan cara penghitungan produksi dan nilai tambah yaitu dengan menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Penggunaan metode ini dalam penghitungan pendapatan nasional mempunyai 2 tujuan penting yaitu :

- a) Untuk mengetahui besarnya sumbangan berbagai sektor di dalam mewujudkan pendapatan nasional;
- b) Sebagai salah satu cara untuk menghindari penghitungan dua kali yaitu dengan hanya menghitung nilai produksi neto yang diwujudkan pada berbagai tahap proses produksi.

Masalah pemerataan pendapatan akan tetap ada selama proses pembangunan berlangsung, sebenarnya secara absolut pendapatan dan golongan yang berpendapatan rendah tidak menurun, bahkan akan naik. Akan tetapi karena pendapatan golongan yang berpendapatan tinggi sangat meningkat, maka kepincangan atau ketimpangan pembagian pendapatan menjadi mencolok. Kemampuan golongan berpenghasilan rendah untuk meningkatkan pendapatan seharusnya lebih cepat dibandingkan dengan golongan berpendapatan tinggi. Bila tidak demikian, disparitas pendapatan antar golongan berpendapatan rendah dan tinggi akan semakin besar. Ada beberapa kenyataan bahwa pendapatan masyarakat kelompok menengah dan atas mempunyai kenaikan lebih cepat dan kelompok miskin melalui tahap-tahap pembangunan.

Bagi negara-negara berkembang umumnya termasuk Indonesia menghadapi dilema dalam perekonomian yaitu menyangkut pilihan dan prioritas yang diinginkan dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak selalu semata-mata diukur berdasarkan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita saja. Kita harus memperhatikan sejauh manakah distribusi pendapatan telah menyebar ke segenap penduduk dan lapisan masyarakat, serta siapa saja yang telah menikmati hasil dari pembangunan tersebut.

Beberapa ekonom berpendapat bahwa perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Terutama dalam kepemilikan barang modal (*capital stock*). Pihak yang memiliki barang modal jumlahnya lebih banyak bila dibandingkan dengan pihak yang memiliki sedikit barang modal. Perbedaan pendapatan karena perbedaan kepemilikan awal faktor produksi tersebut, menurut teori neo-klasik akan dapat dihilangkan atau dikurangi melalui suatu proses penyesuaian otomatis. Dengan proses tersebut hasil pembangunan akan menetes (*trickle down*) dan menyebar sehingga menimbulkan keseimbangan baru. Bila setelah proses tersebut masih ada perbedaan pendapatan yang cukup timpang, maka dapat dilakukan pendekatan Keynesian yaitu melalui sistem perpajakan dan subsidi yang dipergunakan sebagai alat untuk redistribusi pendapatan dan mengurangi kemiskinan.

Pendapat lain menyatakan bahwa adanya ketidakmerataan pembagian pendapatan terjadi akibat dari ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan pasar disini diartikan sebagai adanya gangguan yang mengakibatkan persaingan dalam pasar tidak dapat bekerja secara sempurna. Gangguan tersebut selain berupa perbedaan dalam kepemilikan sumberdaya juga dalam bentuk perbedaan info, adanya intervensi pemerintah melalui berbagai peraturan, selain itu seringkali terjadi pada beberapa negara yang sedang berkembang yaitu adanya keterkaitan antara beberapa perilaku ekonomi dengan pemerintah.

Selanjutnya, kesenjangan distribusi pendapatan merupakan suatu masalah pokok dalam pembangunan karena distribusi pendapatan ini mencerminkan merata atau tidaknya hasil pembangunan yang dilakukan.

Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara dikalangan penduduknya. Terdapat berbagai kriteria atau tolak ukur untuk menilai ketidakmerataan (parah atau lunaknya ketimpangan) distribusi yang dimaksud. Tiga diantaranya yang paling lazim digunakan adalah Kurva Lorenz dan Indeks atau Rasio Gini.

3. Pendidikan

a. Pendidikan Formal

Pendidikan dan latihan merupakan dua unsur yang saling terkait dan merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab yang tidak bisa dilaksanakan secara sembarangan artinya diperlukan penanganan yang sejenis dan berencana karena melaksanakan pendidikan dan latihan memerlukan biaya yang besar, tetapi hasil yang diperoleh juga cukup besar dan kesalahpahaman diperkecil.

Berdasarkan UU-SPN (Pasal 1 ayat 1) pengertian pendidikan adalah :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu usaha yang perlu dimiliki oleh seseorang untuk dapat mengembangkan potensi diri yang berguna dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara.

Menurut Idris dalam Yulisari (1992:2) pengertian pendidikan adalah :

“Serangkaian kegiatan interaksi yang bertujuan antar manusia dewasa dan peserta didik secara tatap muka atau dengan menggunakan media dalam rangka memberikan bantuan terhadap perkembangan peserta didik seutuhnya. Dalam arti supaya dapat mengembangkan potensi fisik, emosi, sosial, sikap moral, pengetahuan dan keterampilan”.

Di sini pendidikan adalah suatu tujuan yang ingin dicapai, sehingga diperlukan usaha terencana, baik yang dilakukan dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Sedangkan pendidikan menurut Habinson dalam Nawi (1994:23) bahwa pendidikan merupakan pengaruh lingkungan atas diri individu yang menghasilkan perbuatan-perbuatan atau perubahan-perubahan yang tetap dalam kebiasaan tingkah laku.

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan mempengaruhi pula tingkat penghasilan tenaga kerja, sehingga mengakibatkan pula perubahan terhadap produktivitas kerja. Peningkatan pendidikan atau keterampilan akan mampu meningkatkan kemampuan kerja atau produktivitas seseorang dalam bekerja, sehingga pendapatannya meningkat dan tingkat kesejahteraannya juga akan meningkat.

Jadi latar belakang pendidikan dapat membedakan kualitas seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka kemampuannya akan bertambah pula, maka hal ini yang membuat seseorang bernilai lebih dibandingkan dengan orang lain yang mempunyai pendidikan lebih rendah. Untuk mengadakan perubahan yang terarah dan terencana untuk suatu perbaikan, dibutuhkan orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi dan memadai sehingga dapat diandalkan.

Secara teoritis pendidikan menurut Simanjuntak (1998:13) adalah :

“Tingkat pendidikan dan keterampilan kerja akan mempengaruhi tingkat pendayagunaan tenaga kerja yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat produktivitas. Rendahnya tingkat produktivitas mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan, sebaliknya tenaga kerja dengan pendidikan tinggi akan mempunyai produktivitas yang tinggi dan karenanya akan mendapatkan balas jasa (upah) yang tinggi”.

Dengan demikian dapat disimpulkan pendidikan merupakan langkah yang paling strategis dalam upaya meningkatkan pendapatan, karena semakin tinggi tingkat pendidikan maka produktifitas yang dihasilkan akan tinggi pula sehingga upah yang diterima akan tinggi dan begitu juga sebaliknya.

Menurut Todaro (2000:406) pendidikan adalah kunci untuk menciptakan, mengadopsi dan menyebarkan ilmu pengetahuan, namun penyebaran kesempatan untuk memperoleh akses kependidikan tersebut sangat tidak merata terutama bagi kalangan masyarakat miskin. Pendidikan merupakan upaya untuk mengantarkan manusia kearah dewasa. Melalui pendidikan masyarakat mendapatkan kesempatan untuk membina kemampuannya dan mengatur pola kehidupan dan membuka kesempatan

untuk mengupayakan perbaikan dan kemajuan kehidupan masyarakat. Pendidikan merupakan langkah yang paling strategis dalam upaya mengatasi kemiskinan yang berkaitan erat dengan pendapatan rumah tangga.

b. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Distribusi Pendapatan

Menurut Todaro (2003:435) tingkat penghasilan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan maka penghasilan yang diperoleh juga akan tinggi. Ketimpangan pendidikan diukur dengan menggunakan Koefisien Gini atau *Gini Ratio* dengan melihat rata-rata tahun bersekolah penduduk.

Menurut Simanjuntak (1998:69), pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan sumberdaya manusia. Pendidikan tidak hanya menambah tapi juga meningkatkan keterampilan bekerja, sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja.

Kesejahteraan sosial berhubungan positif dengan pendapatan perkapita dan tingkat pendapatan. Ketimpangan yang ekstrem menyebabkan inefisiensi ekonomi. Penyebabnya adalah pada tingkat rata-rata berapa pun, ketimpangan yang semakin tinggi akan menyebabkan semakin kecilnya bagian populasi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman atau sumber kredit lainnya. Seseorang yang berpendapatan rendah pada umumnya mereka tidak dapat menyediakan pendidikan yang memadai bagi anak mereka dan untuk mengembangkan bisnis.

Ketimpangan yang terjadi di antara penduduk yang berada di atas garis kemiskinan, bahwa disparitas pendapatan yang ekstrem melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas. Ketimpangan yang tinggi dapat membuat kaum miskin kesulitan dalam memperoleh pendidikan, dikarenakan ketidakmampuan mereka dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka. Masyarakat yang berpendidikan rendah umumnya mempunyai produktivitas yang rendah sehingga penghasilan yang mereka terima akan rendah pula.

4. Pendapatan

Pengertian Pendapatan

Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Dengan kata lain pendapatan adalah jumlah harta pada awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode bukan hanya yang dikonsumsi.

Menurut Valerry J. Hull yang dikutip dalam Nawi (1995:9) menyebutkan pendapatan adalah gambaran yang lebih tepat posisi ekonomi keluarga yang merupakan jumlah keseluruhan pendapatan atau kekayaan keluarga (termasuk semua barang dan hewan peliharaan), yang dibagi kedalam tiga kelompok pendapatan, yaitu pendapatan tinggi, pendapatan sedang dan pendapatan rendah.

Jhingan (2003:31) menyatakan bahwa pendapatan adalah penghasilan berupa uang selama periode tertentu. Maka dari itu, pendapatan dapat

diartikan sebagai semua penghasilan atau menyebabkan bertambahnya kemampuan seseorang, baik yang digunakan untuk konsumsi maupun yang digunakan untuk tabungan. Dengan pendapatan yang diperoleh tersebut digunakan untuk keperluan hidup dan untuk mencapai kepuasan.

Menurut Lipsey (1987:152) pendapatan rumah tangga terbagi menjadi dua sebagai berikut :

Pendapatan riil rumah tangga (*real income*) ialah Pendapatan riil rumah tangga merupakan daya beli dari pendapatan nominalnya, yaitu banyaknya barang atau jasa yang dapat dibeli dengan pendapatan nominal. Sedangkan pendapatan nominal rumah tangga (*money income*) ialah Pendapatan nominal rumah tangga merupakan pendapatan yang diukur dalam satuan uang, sekian rupiah per minggu atau per tahun.

Partadireja (2001:37) pendapatan adalah balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi atau penggunaan faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja dan *skill* yang dimilikinya. Penggunaan tanah diberi balas jasa yang disebut sewa, tenaga kerja diberi upah atau gaji, modal diberi bunga dan *skill* diberi keuntungan.

Lebih lanjut, pengertian pendapatan menurut Hull (dalam Nawi, 1989:9) adalah :

“Pendapatan adalah gambaran yang lebih tepat tentang posisi ekonomi keluarga, yang merupakan jumlah keseluruhan pendapatan atau kekayaan keluarga (termasuk semua barang dan hewan peliharaan), dipakai untuk membagi kedalam tiga kelompok pendapatan, yaitu pendapatan tinggi, pendapatan sedang, dan pendapatan rendah”.

Sedangkan perhitungan pendapatan keluarga menurut Mulyanto (1985:67) adalah semua hasil yang diterima oleh semua anggota keluarga melalui berbagai jenis usaha kegiatan ekonomi. Tolak ukur yang digunakan adalah pendapatan perkapita pertahun dari keluarga tersebut. Pendapatan keluarga dapat dilihat dalam bentuk uang, dapat pula dalam bentuk barang atau fasilitas-fasilitas misalnya rumah dinas, pengobatan gratis dan lain-lain.

Pendapatan yang diterima dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. (Mulyanto,1985:92) membedakan pendapatan menjadi tiga bagian yaitu pendapatan berupa uang, barang dan lain-lain. Selanjutnya pendapatan juga dikelompokkan ke dalam pendapatan sektor formal, informal dan subsistem yaitu :

- a) Pendapatan sektor formal yakni segala penghasilan baik berupa uang ataupun barang yang sifatnya reguler dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa dan kontraprestasi dari sektor formal.
- b) Pendapatan dari sektor informal yakni segala penghasilan baik berupa barang atau uang yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontraprestasi dari sektor informal.
- c) Pendapatan dari sektor subsistem terjadi apabila produksi dan konsumsi terletak ditangan suatu masyarakat kecil.

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa pendapatan itu merupakan masukan bagi masing-masing keluarga yang mana keadaan keluarga satu dengan keluarga lainnya tidak sama, tapi dipengaruhi oleh berbagai aktifitas keluarga tersebut baik jenis maupun macam kegiatannya. Aktifitas dari kegiatan inilah yang membedakan dan mempengaruhi pendapatan keluarga sehingga menimbulkan klasifikasi pendapatan masyarakat tinggi, sedang dan rendah.

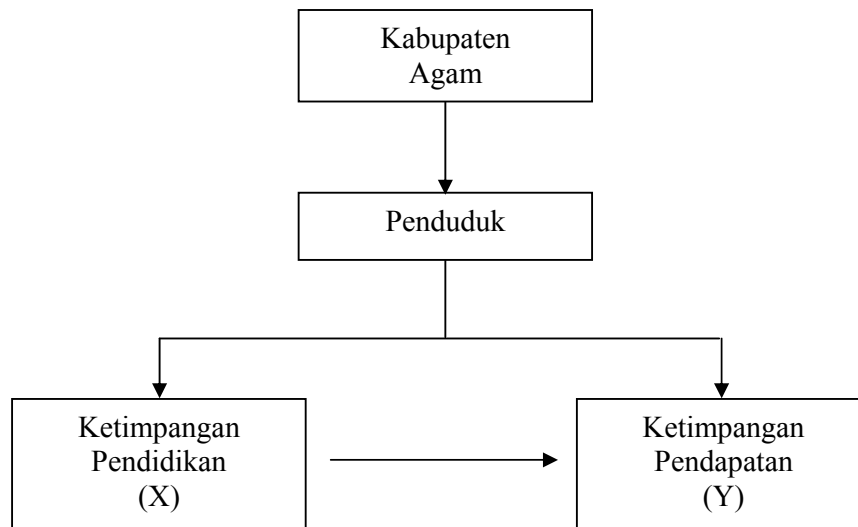
B. Penelitian Terdahulu

Anggun Melanie (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Distribusi Pendapatan di Sumatera Barat dimana variabel bebasnya yaitu produktivitas (X1), tingkat pendidikan (X2), produktivitas investasi (X3) dan ketimpangan distribusi pendapatan (Y) menyatakan bahwa pada tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Propinsi Sumatera Barat. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi pendapatan masyarakat dan ketimpangan distribusi pendapatan akan menurun.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan dari teori yang telah dikemukakan mengenai analisis pengaruh ketimpangan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Agam menyatakan bahwa adanya pengaruh antara ketimpangan pendidikan (X) terhadap ketimpangan pendapatan (Y).

Ketimpangan pendidikan (X) akan berpengaruh terhadap jumlah pendapatan yang diterima, dimana jika semakin tinggi tingkat pendidikan maka produktivitas kerja penduduk akan meningkat, sehingga pendapatan yang diterima juga akan meningkat. Oleh karena itu ketimpangan pendidikan penduduk di Kabupaen Agam akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan diantara penduduk. Dari hal tersebut dapat dibuat kerangka konseptual.



Gambar 3 : Kerangka Konseptual Pengaruh Ketimpangan Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaen Agam.

D. Hipotesis

Berdasarkan pada perumusan masalah maka rumusan hipotesis penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang disajikan antara ketimpangan pendidikan dengan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Agam.

$$H_o : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan pada Bab IV tentang Analisis Pengaruh Ketimpangan Tingkat Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Agam maka dapat disimpulkan bahwa:

Terdapat pengaruh yang signifikan antara ketimpangan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Agam. Karena t_{hitung} yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan t_{tabel} yakni $1,907 > 1,771$. Pada 0,05 akibatnya H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini diterima, bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara ketimpangan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Agam.

B. Saran

Dengan terbuktinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara ketimpangan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Agam, maka penulis menyarankan kepada seluruh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Agam agar adanya pemerataan pendidikan dan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi serta dengan mengefektifkan program pemerintah seperti program sekolah gratis, BOS (bantuan operasional sekolah) dan lain-lain sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi maka produktifitas kerja penduduk juga akan meningkat sehingga pendapatan yang diterima juga akan meningkat. Dan dengan sendirinya ketimpangan pendidikan akan menurun sehingga ketimpangan pendapatan di Kabupaten Agam juga akan menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (1991). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- BPS Sumatera Barat. (1994-2008). *Agam Dalam Angka*.
- Deliarnov. (1985). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Gujarati, Damodar. (1997). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : Erlangga.
- Hasan, M.Iqbal. (1999). Pokok-pokok Materi Statistik 2. Bandung : Bumi Aksara.
- Idris, Zahara. (1988). *Dasar-dasar Pendidikan*. Bandung : Aksara.
- Irawan & Suparmoko. (1981). *Ekonomi dan Pembangunan*. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UGM.
- Jhingan, ML. (2003). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Lipsey, Ricard G & Peter O, Steinger. (1991). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Melanie, Anggun. (2008). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Distribusi Pendapatan di Sumatera Barat*. Skripsi UNP. Padang.
- Mulyanto, Sumardi. (1985). *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Nazir, Moh. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Partadireja, Ace. (1979). *Penghitungan Pendapatan Nasional*. Jakarta: LPSES.
- Santoso, Singgih. (2000). *SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Simanjuntak, J Payaman. (1998). *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Jakarta : Fakultas Ekonomi UI.
- Susenas Sumatera Barat. (1994-2008).